

# Ekonomi Politik Media Platform Lokal: Relasi Kuasa antara Pemerintah Daerah dan Media Online di Jawa Timur

Rachmat Hidayat<sup>1\*</sup>, Udi Rusadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, RTA Milono, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Lenteng Agung Raya No.32, Lenteng Agung, Jakarta, Indonesia

\*Penulis korespondensi; email: rachmathidayat@umpr.ac.id

---

## Abstrak

Artikel ini menganalisis relasi kuasa antara media online lokal dan pemerintah daerah dalam lanskap ekonomi digital di Jawa Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ketergantungan media lokal terhadap pendanaan publik dan tekanan algoritmik dari platform digital global. Penelitian menggunakan metode kualitatif kritis dengan pendekatan *Political Economy of Communication* (PEC) Dwayne Winseck, melalui studi kasus instrumental pada dua media lokal: Kantor Berita Antara Biro Jawa Timur dan Harian Bhirawa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, serta analisis isi terhadap konten media selama Februari–April 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan finansial terhadap pemerintah daerah berdampak pada independensi redaksional dan mendorong praktik jurnalisme pesanan. Logika algoritma platform digital semakin meminggirkan konten lokal dan memperkuat ketimpangan visibilitas media. Studi ini menunjukkan bahwa media lokal berada dalam tekanan struktural dari negara dan platform digital sekaligus. Diperlukan kebijakan desentralisasi informasi dan perlindungan terhadap independensi media untuk memperkuat demokrasi lokal di era digital.

**Kata kunci:** ekonomi politik media; media lokal; pemerintah daerah; platform digital; Jawa Timur.

## Abstract

*This article explores the power dynamics between local online media and regional governments within the context of Indonesia's evolving digital economy. It addresses the structural pressures faced by local media, particularly their growing financial reliance on public budgets and their diminishing visibility due to global digital platforms' algorithmic systems. Employing a qualitative case study approach grounded in the Political Economy of Communication framework by Dwayne Winseck, the study examines two local news organizations in East Java: the state-owned Antara News Agency (East Java Bureau) and the privately owned Bhirawa Daily. Data were gathered through in-depth interviews, limited participant observation, and content analysis of media outputs published between February and April 2025. The findings reveal that editorial independence is compromised by economic clientelism, where local governments serve as the primary sponsors of news production. Additionally, algorithmic marginalization on global platforms exacerbates economic inequality and restricts public access to diverse local content. This study contributes to the discourse on media political economy in the Global South by highlighting the intersection of state power, digital capitalism, and journalistic autonomy. It calls for more equitable information governance and stronger policy support to safeguard local media integrity in the digital era.*

**Keywords:** political economy media; local media; local government; digital platforms; East Java.

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, transformasi digital telah mengubah lanskap industri media di Indonesia secara fundamental. Media lokal, yang sebelumnya mengandalkan langganan dan penjualan cetak, kini menghadapi realitas baru: ketergantungan terhadap pendapatan dari iklan digital dan kerja sama dengan

pemerintah daerah (Pemda). Sementara digitalisasi membuka akses luas terhadap audiens, ia juga memunculkan tantangan serius dalam hal keberlanjutan ekonomi dan independensi editorial, terutama bagi media lokal yang beroperasi di wilayah non-metropolitan seperti kabupaten/kota di Jawa Timur. Di tengah arus informasi yang didominasi oleh platform besar seperti Google dan Meta, media lokal kerap terpinggirkan secara algoritmik, sekaligus mengalami tekanan struktural dari relasi ekonomi-politik lokal.

Perkembangan teknologi digital membawa dampak mendalam terhadap ekosistem media massa, termasuk di Indonesia. Di tengah percepatan platformisasi dan distribusi konten berbasis algoritma, media tidak hanya menghadapi tantangan teknis dan ekonomi, tetapi juga tekanan struktural dari kekuatan politik dan pasar. Di tingkat lokal, situasi ini memunculkan dinamika baru dalam relasi antara media, pemerintah daerah, dan korporasi lokal yang membentuk wajah jurnalisme kontemporer. Dalam konteks inilah penting untuk menelaah kembali teori ekonomi politik media, tidak hanya sebagai kajian makro atas kepemilikan media nasional, tetapi juga sebagai instrumen analisis terhadap aktor-aktor media di wilayah dan daerah.

Salah satu dinamika yang muncul adalah relasi kuasa antara media lokal dan pemerintah daerah. Berbagai media online lokal di Jawa Timur menunjukkan pola ketergantungan pada pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam bentuk kontrak advertorial, publikasi kegiatan resmi, hingga kerja sama informasi strategis. Dalam banyak kasus, hubungan ini mengaburkan batas antara iklan dan berita, serta mendorong munculnya praktik jurnalisme pesanan (*order berita*) yang menurunkan kualitas dan independensi jurnalisme. Pemerintah daerah, di sisi lain, menggunakan kekuatan ekonomi dan akses informasi sebagai alat untuk mengendalikan representasi publik melalui media.

Fenomena ini belum banyak ditelaah secara mendalam dalam kajian ekonomi politik media di Indonesia, yang selama ini lebih berfokus pada konglomerasi media nasional, regulasi penyiaran, atau platform digital transnasional. Padahal, relasi antara media lokal dan aktor politik lokal sangat menentukan ekosistem informasi publik di daerah, yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi lokal, partisipasi warga, dan transparansi pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kekuatan ekonomi, politik, dan teknologi berkelindan dalam membentuk kondisi kerja media lokal saat ini.

Penelitian ini secara khusus memilih dua media sebagai objek studi: Kantor Berita Antara Biro Jawa Timur dan Harian Bhirawa, yang masing-masing merepresentasikan dua model kepemilikan media yang berbeda. Antara Jatim adalah bagian dari Perum LKBN Antara, sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki jaringan nasional dan ditugaskan menyampaikan informasi resmi negara kepada publik. Sebagai media negara, Antara tidak hanya tunduk pada regulasi pers nasional, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membingkai narasi pembangunan dan kebijakan pemerintah. Fungsi ganda ini menjadikan Antara sebagai media yang memiliki posisi unik—berperan sebagai pelayan publik, namun sekaligus sebagai corong institusional negara.

Harian Bhirawa merupakan media cetak dan daring lokal yang berbasis di Jawa Timur dan beroperasi secara independen. Meski bersifat swasta, Harian Bhirawa memiliki kedekatan historis dan struktural dengan aktor-aktor ekonomi-politik lokal, terutama pemerintah daerah dan kelompok elite bisnis. Media ini dikenal fokus dalam meliput isu-isu pembangunan daerah, pemerintahan, dan kebijakan publik, serta seringkali menjadi mitra kerja sama advertorial pemerintah daerah. Posisi ini menempatkan Bhirawa dalam persimpangan antara jurnalisme publik dan kepentingan pasar lokal.

Pemilihan kedua media ini dilakukan secara purposif karena keduanya merepresentasikan konfigurasi yang berbeda dari model ekonomi politik media: satu sebagai representasi media milik negara (*state-owned*) dan satu lagi sebagai media lokal swasta dengan keterikatan politis (*privately-owned with political ties*). Dengan membandingkan keduanya, penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana struktur ekonomi dan politik memengaruhi produksi konten, tetapi juga bagaimana media di era digital menavigasi tekanan dari institusi kekuasaan dan logika platform. Kajian ini penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana bentuk kekuasaan bekerja dalam keseharian media lokal dan bagaimana ruang demokrasi informasi dibentuk atau dibatasi oleh relasi ekonomi-politik di tingkat akar rumput.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Reconstructed Political Economy of Communication* (PEC) seperti yang dikembangkan oleh Dwayne Winseck (2016), yang memperluas cakupan analisis ekonomi politik media dengan memasukkan elemen infrastruktur komunikasi, platform global, serta relasi antara negara dan kapital digital. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap dinamika ekonomi politik media di *Global South*, termasuk Indonesia, dengan memperhatikan ketimpangan struktural dan kompleksitas aktor lokal dan global.

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain dapat disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Tabel relevansi penelitian terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian & Publikasi	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi	Perbedaan
Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012)	Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia, Centre for Innovation Policy and Governance	Oligarki media nasional di Indonesia	Struktur kepemilikan media nasional bersifat oligarkis dan berdampak pada bias isi berita	Menjadi dasar bahwa struktur kepemilikan memengaruhi independensi media	Fokus pada media nasional, bukan media lokal digital di daerah
Sudiby, A. (2017)	Media Lokal dalam Pusaran Politik dan Ekonomi, dalam buku Politik Media di Masa Transisi Demokrasi	Praktik media lokal dan pemerintah daerah	Ada relasi transaksional antara media lokal dan pemda terkait kontrak pemberitaan	Menunjukkan awal adanya ketergantungan media lokal pada APBD	Belum membahas platform digital atau ekonomi politik digital secara mendalam
Lim, M. (2020)	<i>The Political Economy of Hoaxes in Indonesia's Digital Economy</i> , Journal of Contemporary Asia, 50(4), 585–605	Platformisasi media dan algoritma digital	Platform seperti Google dan Facebook mengubah pola pendapatan dan kerja jurnalisisme	Relevan dalam memahami tekanan ekonomi dari platform digital	Fokus pada media arus utama dan belum mengkaji keterkaitan dengan pemerintah lokal
Haryanto, I. (2021)	Politik Uang dalam Media Lokal: Studi atas Praktik Advertorial dan Jurnalisme Amplop, <i>Remotivi Policy Brief</i>	Advertorial dan amplop dalam praktik jurnalistik	Hubungan informal antara media dan elite lokal merusak integritas jurnalistik	Memberi gambaran praktik nonformal dalam relasi media dan penguasa	Tidak mengaitkan secara teoretik dengan ekonomi politik media
Winseck, D. (2016)	<i>Reconstructing the Political Economy of Communication for the Digital Media Age</i> , The Political Economy of Communication, 4(1), 73–114	Reorientasi teori ekonomi politik komunikasi	Menawarkan kerangka analisis struktural atas relasi antara negara, pasar, dan media digital	Menjadi fondasi teoritis utama penelitian ini	Belum diterapkan pada konteks media lokal di Global secara mikro

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tabel di atas, dapat disimpulkan adanya *gap of knowledge* sebagai berikut:

- Minimnya kajian mikro yang secara spesifik menelaah bagaimana media lokal digital di tingkat kabupaten/kota bergantung pada struktur ekonomi-politik daerah, khususnya melalui pendanaan APBD dan kerjasama konten (kontrak pemberitaan).
- Belum ada studi yang mengintegrasikan model Propaganda Noam Chomsky dan model *Reconstructed Political Economy* dari Winseck untuk menganalisis kondisi media lokal di Indonesia sebagai bagian dari *clientelist political communication* dalam konteks platformisasi digital.
- Kajian terdahulu cenderung mengabaikan interaksi simultan antara tiga tekanan utama: (a) kekuasaan lokal (ekonomi politik daerah), (b) logika platform digital (komodifikasi klik dan *traffic*), dan (c) otonomi redaksi/jurnalis dalam mengelola independensi dan etika jurnalistik.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan merumuskan model interaksi tripartit antara pemerintah daerah – media lokal – platform digital dalam kerangka ekonomi politik media kontemporer. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi politik komunikasi dengan konteks lokal Indonesia yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dan sistematis.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: Bagaimana relasi kuasa antara pemerintah daerah dan media online lokal di Jawa Timur terbentuk dan dijalankan dalam

ekosistem ekonomi digital saat ini? Subpertanyaan yang diajukan meliputi: (1) Bagaimana pola pendanaan media lokal di tingkat daerah? (2) Bagaimana praktik relasi antara media dan pemerintah dalam produksi dan distribusi informasi? (3) Bagaimana platformisasi dan algoritma digital membentuk distribusi informasi oleh media lokal? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritik dan empiris terhadap kajian ekonomi politik media di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan tata kelola informasi daerah yang lebih adil dan transparan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara komprehensif, penelitian ini mendasarkan analisisnya pada kajian teori dan temuan studi sebelumnya yang relevan. Oleh karena itu, bagian berikut akan memaparkan kerangka teoritik dan literatur yang menjadi landasan konseptual dalam studi ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Ekonomi Politik Media: Kerangka Teoritis Kritis

Kajian ekonomi politik media merupakan pendekatan kritis yang mempelajari bagaimana struktur ekonomi, kekuasaan politik, dan kepemilikan media membentuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi informasi. Pendekatan ini berupaya mengungkap kepentingan-kepentingan dominan di balik sistem komunikasi dan mengkritisi cara media beroperasi dalam kerangka kapitalisme.

Salah satu tokoh kunci dalam tradisi ini adalah Vincent Mosco (1996), yang mendefinisikan ekonomi politik komunikasi sebagai studi tentang kontrol atas sumber daya komunikasi, terutama dalam konteks produksi dan distribusi informasi. Mosco menekankan pentingnya memahami media bukan sekadar sebagai saluran penyampai pesan, tetapi sebagai institusi ekonomi-politik yang terikat dalam struktur kapitalisme global. Pendekatan ini menyoroti bagaimana relasi kelas, kekuasaan, dan institusi negara membentuk orientasi media dan isi informasi yang disebarluaskan.

Noam Chomsky dan Edward S. Herman (1988) melalui Propaganda Model-nya menegaskan bahwa media dalam sistem kapitalisme tidak bebas secara struktural. Mereka mengidentifikasi lima filter yang memengaruhi isi pemberitaan: kepemilikan media, ketergantungan pada iklan, ketergantungan pada sumber informasi resmi, tekanan balik dari elite dominan, dan ideologi dominan (seperti antikomunisme atau neoliberalisme). Dalam konteks Indonesia, model ini relevan untuk menelaah bagaimana media lokal—yang kerap bergantung pada pendanaan publik seperti APBD—mencerminkan relasi kuasa yang membatasi independensinya.

Chomsky menyoroti bahwa pembingkai berita dan normalisasi narasi-narasi dominan berfungsi sebagai mekanisme "produksi persetujuan" terhadap kekuasaan, tanpa perlu represi langsung. Dalam sistem ini, ketergantungan ekonomi terhadap pemerintah atau sponsor mengarah pada jurnalisme yang bersifat konfirmatif, bukan kritis. Hal ini sejalan dengan pandangan Graham Murdock dan Peter Golding (2000), yang menyatakan bahwa dalam masyarakat kapitalistik, sistem komunikasi cenderung bergerak menuju "komunikasi pasar", di mana informasi diperlakukan sebagai komoditas, bukan sebagai hak publik.

Dalam penelitian ini, pendekatan ekonomi politik digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis bagaimana relasi struktural antara media lokal dan pemerintah daerah memengaruhi kebijakan redaksional, orientasi isi berita, dan relasi ekonomi dalam produksi informasi. Gagasan Mosco dan Chomsky memberikan dasar konseptual untuk memahami posisi subordinat media lokal dalam struktur kekuasaan ekonomi-politik yang lebih besar.

### 2.2 Ekonomi Politik Komunikasi Digital: Perspektif Global

Perkembangan teknologi digital dalam dekade terakhir telah mendorong para pemikir ekonomi politik media untuk memperluas kerangka analisis mereka. Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi politik digital menyoroti bagaimana platform digital, algoritma, dan infrastruktur komunikasi global telah menciptakan tatanan komunikasi baru yang sarat ketimpangan. Tidak hanya negara, tetapi juga korporasi teknologi multinasional kini memainkan peran dominan dalam mengatur arus informasi dan distribusi konten.

Dwayne Winseck (2016) mengajukan pendekatan *Reconstructed Political Economy of Communication*, yang menekankan perlunya memahami relasi kuasa tidak hanya dalam kerangka negara dan pemilik media, tetapi juga dalam konteks lebih luas yang mencakup platform digital global. Ia menunjukkan bahwa media dan informasi berada dalam kontestasi antara kepentingan ekonomi, negara, dan publik, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi dominasi teknologi asing dan kesenjangan infrastruktur digital.

Dalam perspektif Winseck, platformisasi tidak hanya mengubah cara konten diproduksi dan dikonsumsi, tetapi juga menciptakan bentuk baru dari kolonialisme digital. Infrastruktur komunikasi, sistem distribusi berbasis algoritma, dan praktik komodifikasi data telah menempatkan media lokal dalam posisi subordinat—baik secara ekonomi maupun visibilitas publik. Media kecil, terutama di tingkat lokal, sering kali tidak memiliki sumber daya untuk bersaing dalam logika pasar digital yang ditentukan oleh algoritma platform seperti Google dan Meta.

Dalam konteks Indonesia, media lokal menghadapi tekanan ganda: di satu sisi bergantung pada pemerintah daerah untuk pendanaan, dan di sisi lain harus mengikuti logika distribusi platform agar tetap eksis secara digital. Ketergantungan ini mengancam independensi media dan memperlemah perannya sebagai pengawas kekuasaan. Oleh karena itu, analisis terhadap relasi media lokal tidak dapat dilepaskan dari pengaruh global platformisasi informasi.

Studi ini menggunakan perspektif Winseck untuk menelaah bagaimana algoritma, distribusi digital, dan logika platform membentuk posisi media lokal dalam ekosistem informasi. Konsep ini menjadi penting untuk memahami ketimpangan struktural yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga transnasional dalam tatanan komunikasi digital saat ini.

### 2.3 Relasi Media Lokal dan Pemerintah Daerah di Indonesia

Penelitian mengenai relasi antara media lokal dan pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan tersebut umumnya bersifat pragmatis dan transaksional. Ketergantungan media lokal terhadap dana pemerintah daerah—terutama melalui kerja sama publikasi dalam bentuk advertorial—menciptakan struktur relasi yang tidak setara, di mana media cenderung kehilangan independensi editorial demi kelangsungan operasional.

Studi oleh Siregar (2018) dan Sudibyo (2017) mengungkap bahwa banyak media lokal mengandalkan kontrak pemberitaan dari dinas-dinas pemerintah sebagai sumber utama pendapatan. Dalam praktiknya, ruang redaksi menjadi arena negosiasi antara kebutuhan ekonomi media dan kepentingan komunikasi pemerintah daerah. Hal ini diperparah oleh minimnya iklan dari sektor swasta dan tekanan untuk meningkatkan traffic digital guna memperoleh insentif dari platform digital. Hasilnya, jurnalisme yang muncul lebih sering bersifat afirmatif terhadap kekuasaan dibandingkan bersifat kritis atau investigatif.

Perlu diperhatikan lebih seksama bahwa sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada aspek ekonomi semata tanpa mempertimbangkan pengaruh platformisasi digital terhadap praktik redaksional. Dalam konteks saat ini, media lokal tidak hanya berada di bawah tekanan dari kekuatan lokal (pemerintah daerah), tetapi juga menghadapi tantangan dari sistem distribusi konten yang ditentukan oleh algoritma platform global. Dengan kata lain, terdapat dua kutub tekanan—negara dan platform—yang membentuk posisi media dalam sistem informasi lokal.

Relasi antara media lokal dan pemerintah daerah ini dapat dipahami melalui kerangka ekonomi politik sebagai bentuk clientelism digital, di mana transaksi ekonomi membentuk orientasi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Chomsky dalam Propaganda Model-nya, media dalam posisi seperti ini lebih mungkin untuk mereproduksi narasi dominan daripada menawarkan pandangan alternatif. Dalam konteks lokal Indonesia, hal ini berimplikasi pada terbatasnya ruang publik yang benar-benar independen dan demokratis.

Penelitian ini berangkat dari kerangka tersebut untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana relasi ekonomi dan tekanan digital membentuk praktik media lokal. Fokus kajian diarahkan pada dinamika kekuasaan yang tercermin dalam pendanaan, produksi, dan distribusi konten, serta bagaimana media menavigasi tekanan ganda dari negara dan platform.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan desain studi kasus instrumental untuk menganalisis relasi kuasa antara pemerintah daerah dan media online lokal dalam konteks ekonomi politik digital. Studi ini menyoroti dua kasus media di Jawa Timur, yaitu Kantor Berita Antara Biro Jawa Timur dan Harian Bhirawa, yang dipilih berdasarkan pertimbangan keterwakilan struktur kepemilikan (negara vs swasta) dan pola hubungan mereka dengan pemerintah daerah.

### 3.1 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- Wawancara mendalam dengan 10 narasumber yang terdiri dari: 2 pemimpin redaksi, 4 wartawan senior, 2 staf pemasaran iklan, dan 2 pejabat humas pemerintah daerah (Diskominfo). Teknik pemilihan narasumber menggunakan purposive sampling, dengan kriteria: (1) memiliki pengalaman minimal 5 tahun, dan (2) terlibat langsung dalam proses editorial atau hubungan kemitraan media–pemerintah.
- Observasi non-partisipatif dilakukan terhadap aktivitas redaksi dan distribusi konten secara daring selama Februari–April 2025.
- Analisis dokumen dilakukan terhadap kontrak kerja sama pemberitaan, dokumen APBD terkait belanja media, serta arsip pemberitaan dari kedua media.

### 3.2 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif dengan mengacu pada kerangka ekonomi politik komunikasi dari:

- Vincent Mosco (1996): digunakan untuk menelusuri bagaimana struktur ekonomi dan institusional membentuk kontrol atas produksi dan distribusi informasi. Dalam praktiknya, analisis diarahkan pada aspek kepemilikan media, sumber pendanaan, dan posisi media sebagai entitas ekonomi dalam sistem kapitalisme lokal.
- Chomsky & Herman (1988): Propaganda Model digunakan untuk mengidentifikasi lima “filter” dalam praktik editorial, khususnya sejauh mana media mereproduksi narasi pemerintah karena ketergantungan pada pendanaan APBD dan tekanan politik lokal.
- Dwayne Winseck (2016): kerangka *Reconstructed Political Economy* diterapkan untuk menganalisis bagaimana algoritma distribusi digital (misalnya SEO, impresi di Google/Meta) mempengaruhi jenis konten yang diprioritaskan dan posisi media lokal dalam ekosistem platform.

Data dari wawancara dikoding secara manual dengan matriks tematik berbasis teori, sedangkan dokumen dianalisis secara tekstual untuk menemukan relasi kuasa yang terekam dalam kontrak, anggaran, dan pola distribusi konten.

### 3.3. Validitas dan Triangulasi Data

Untuk menjaga validitas, digunakan triangulasi sumber (wawancara dengan berbagai aktor), triangulasi metode (observasi dan analisis dokumen), serta validasi ahli (*expert review*) dari pakar media dan komunikasi politik.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

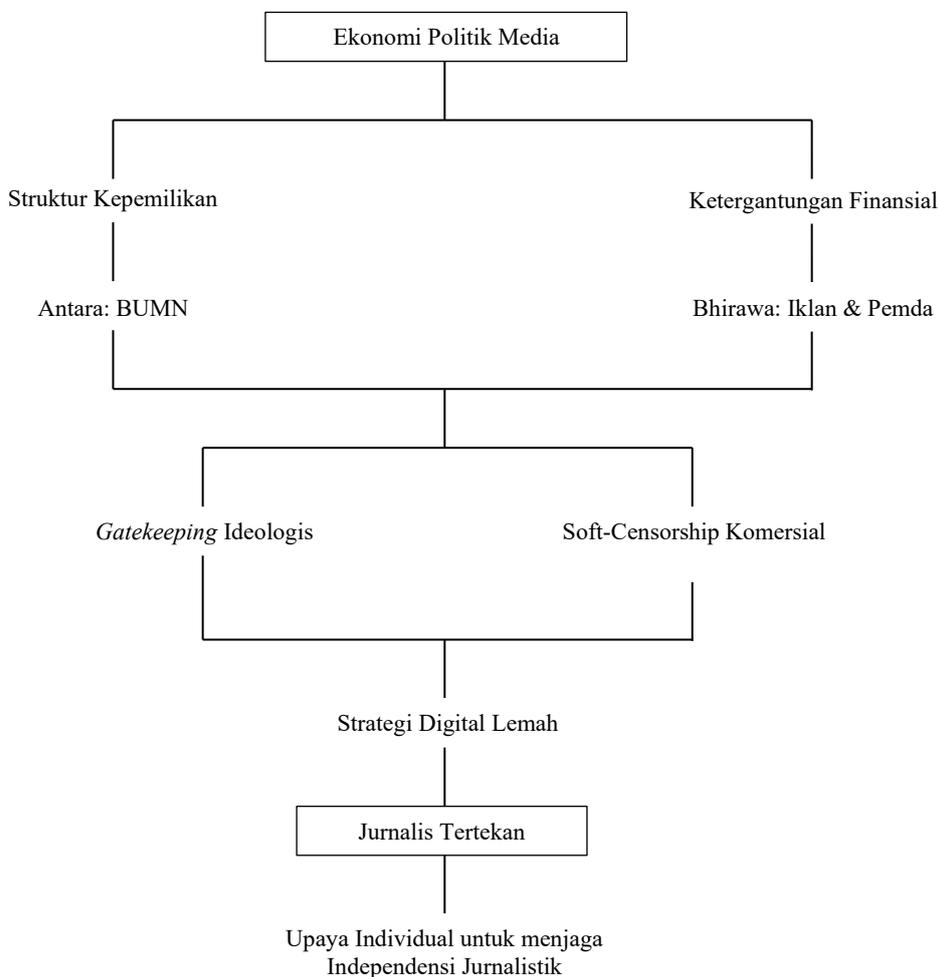
### 4.1 Hasil dan Analisis

**Tabel 2.** Perbandingan dimensi ekonomi politik media antara Antara Jatim dan Harian Bhirawa

Dimensi Analisis	Antara Jatim (Media BUMN)	Harian Bhirawa (Media Swasta Lokal)
Struktur Kepemilikan	Perusahaan Umum Milik Negara (BUMN)	Swasta lokal milik keluarga (korporasi kecil)
Sumber Pendanaan	APBN, kerja sama institusional, layanan publik	Advertorial Pemda, iklan lokal, sirkulasi cetak
Model Bisnis Digital	Belum dikembangkan; sekadar replikasi konten cetak	Situs pasif; tidak ada strategi monetisasi konten digital
Proses Produksi Berita	Berbasis siaran pers pemerintah; sangat birokratis	Berbasis rilis dan kontribusi kontributor; minim investigasi
<i>Gatekeeping</i> dan <i>Sensor</i>	<i>Gatekeeping</i> ketat sesuai agenda negara	<i>Self-censorship</i> tinggi terhadap mitra iklan
Ketergantungan pada Pemerintah	Sangat tinggi, terikat dalam fungsi pelayanan publik	Tinggi, terutama dalam kerja sama advertorial dan iklan
Strategi Platform Digital	SEO dasar, tidak ada optimalisasi algoritma	Posting otomatis, tidak ada tim digital khusus
Peran Jurnalis dalam Konten	Terbatas oleh struktur birokrasi	Tergantung minat dan kemampuan individu, tanpa dukungan redaksi
Tekanan Eksternal dalam Produksi	Tekanan implisit dari pemilik institusi (negara)	Tekanan dari klien (iklan, advertorial)
Upaya Menjaga Independensi	Ada upaya di ruang personal (media sosial)	Inisiatif pribadi, tidak terstruktur

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan jurnalis senior, redaktur pelaksana, serta pengamatan langsung pada proses produksi berita dan distribusinya di dua institusi media yang menjadi objek studi. Temuan lapangan dapat diringkas dalam empat aspek utama seperti pada Tabel 2.

Gambar 1 menggambarkan bahwa meskipun kedua media memiliki latar belakang kelembagaan yang berbeda (negara vs swasta), keduanya sama-sama berada dalam struktur ekonomi politik yang membatasi kemandirian pers. Hal ini berdampak pada jenis konten yang dihasilkan, proses produksi berita, hingga strategi adaptasi digital.



Gambar 1. Diagram tematik hasil observasi lapangan

#### 4.1.1 Pola Pendanaan Media Lokal di Tingkat Daerah

Struktur kepemilikan media merupakan elemen kunci dalam memahami pola pendanaan dan orientasi redaksional media lokal. Dalam konteks Jawa Timur, studi ini menelaah dua model yang kontras: Kantor Berita Antara Biro Jawa Timur sebagai representasi media milik negara (BUMN), dan Harian Bhirawa sebagai media swasta lokal yang memiliki hubungan historis dengan elite politik daerah.

Antara Jatim sebagai bagian dari Perum LKBN Antara memperoleh pendanaan dari APBN dan kerja sama institusional dengan kementerian dan pemerintah daerah. Meski memiliki kekuatan infrastruktur, posisi sebagai media resmi negara membatasi fleksibilitas editorial. Dalam wawancara, jurnalis menyebut adanya tekanan implisit untuk menyesuaikan narasi dengan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemberitaan didominasi liputan resmi dan siaran pers, dengan ruang terbatas untuk kritik atau investigasi.

Di sisi lain, Harian Bhirawa menunjukkan model ekonomi yang lebih terfragmentasi. Meskipun secara hukum independen, operasional media sangat bergantung pada dana APBD, terutama dari kontrak advertorial dan publikasi kegiatan dinas pemerintah. Ketika momen politik lokal meningkat—misalnya menjelang Pilkada atau penyusunan LKPD—aliran dana ini meningkat dan secara langsung memengaruhi konten. Redaktur mengakui bahwa banyak ruang redaksional dialokasikan untuk berita pesanan, sementara liputan kritis kerap disingkirkan untuk menjaga relasi dengan mitra strategis.

Perbedaan model kepemilikan juga memengaruhi strategi adaptasi digital. Antara cenderung mempertahankan model distribusi vertikal yang birokratis, sementara Bhirawa mencoba adaptasi melalui SEO dan media sosial meski tanpa dukungan sumber daya digital yang memadai. Keduanya belum sepenuhnya menjadikan kanal daring sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Dalam kerangka ekonomi politik media (Mosco, 2009), struktur kepemilikan dan pendanaan membentuk komodifikasi informasi. Temuan ini juga mengafirmasi dua dari lima filter dalam Propaganda Model Chomsky dan Herman (1988), yakni: kepemilikan dan pendanaan. Kedua media menunjukkan bagaimana tekanan struktural ekonomi-politik—meski dalam bentuk berbeda—menghambat kebebasan editorial dan membatasi keragaman informasi.

Dalam konteks lokal, pola ini menciptakan mekanisme kendali yang tidak selalu bersifat koersif, melainkan berlangsung melalui struktur loyalitas birokratis (pada media negara) dan skema patron-klien (pada media swasta). Implikasinya adalah terbentuknya ruang publik yang sempit dan homogen, di mana informasi cenderung memvalidasi kekuasaan daripada menantanginya.

#### 4.1.2 Praktik Relasi antara Media dan Pemerintah dalam Produksi dan Distribusi Informasi

Produksi dan distribusi berita di media lokal berlangsung dalam struktur relasi kuasa yang kompleks. Dalam kerangka ekonomi politik media, proses ini bukan hanya persoalan teknis jurnalistik, tetapi juga mencerminkan posisi media dalam jaringan kekuasaan dan ekonomi lokal. Studi ini menemukan bahwa baik Antara Jatim maupun Harian Bhirawa menunjukkan pola relasi yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor dominan dalam pembentukan agenda redaksional.

Pada kantor berita Antara Jatim, proses peliputan sangat terstruktur dan mengikuti protokol kelembagaan dari pusat. Wartawan bertugas meliput agenda resmi lembaga negara, dan mayoritas berita bersumber dari siaran pers pemerintah. Kontrol terhadap isi tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui norma institusional dan budaya kerja yang mendorong kesesuaian narasi dengan kebijakan negara. Dalam wawancara, beberapa jurnalis menyebut praktik self-censorship sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak “menyimpang” dari jalur institusional.

Sementara itu, di Harian Bhirawa, meski tidak terikat pada struktur birokrasi, redaksi menghadapi tekanan dari mitra ekonomi dan politik lokal. Wartawan dan editor kerap menerima masukan atau permintaan dari pejabat pemerintah terkait isi pemberitaan, khususnya pada konten advertorial. Beberapa naskah disesuaikan atau disunting berdasarkan masukan eksternal demi menjaga hubungan kerja sama. Dalam situasi seperti ini, keputusan editorial lebih bersifat strategis daripada editorial, mempertimbangkan loyalitas klien selain nilai jurnalistik.

Kedua media cenderung menghindari peliputan investigatif, meskipun dengan alasan berbeda. Di Antara, struktur organisasi dan mandat kelembagaan tidak mendorong liputan mendalam yang bersifat kritis. Di Bhirawa, keterbatasan sumber daya dan potensi konflik kepentingan dengan pemerintah daerah membuat liputan sensitif seperti korupsi atau konflik agraria jarang diangkat. Praktik ini menunjukkan bahwa kebebasan pers tidak hanya ditentukan oleh hukum, tetapi juga oleh infrastruktur kelembagaan dan resiko ekonomi-politik yang dihadapi media.

Temuan ini merefleksikan dua lapis kontrol dalam produksi informasi. Dalam Propaganda Model (Herman & Chomsky, 1988), kontrol hadir melalui ketergantungan pada sumber resmi dan tekanan sponsor, yang keduanya terlihat jelas dalam praktik Bhirawa dan Antara. Dalam perspektif Mosco (2009), ini menunjukkan bagaimana produksi informasi telah dikomodifikasi dan dibentuk oleh kepentingan institusional yang melampaui etika jurnalistik.

Dengan demikian, relasi antara media dan pemerintah dalam proses produksi berita menciptakan ruang redaksional yang semu-merdeka. Di satu sisi dikondisikan oleh norma birokratis (pada media negara), dan di sisi lain oleh loyalitas pasar lokal (pada media swasta). Dalam konteks ini, distribusi informasi menjadi sarana legitimasi kekuasaan, bukan sebagai forum deliberatif publik yang kritis dan independen.

#### 4.1.3 Platformisasi dan Algoritma Distribusi Konten Media Lokal

Dominasi platform digital seperti Google, Facebook, dan YouTube telah mengubah struktur distribusi informasi global. Dalam kerangka ekonomi politik media, fenomena ini dikenal sebagai platformisasi—proses di mana media harus menyesuaikan logika produksi dan distribusinya dengan sistem algoritmik yang dikendalikan oleh korporasi teknologi global. Bagi media lokal, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, ini menciptakan struktur ketergantungan baru yang tidak sepenuhnya mereka kuasai.

Dalam studi ini, baik Antara Jatim maupun Harian Bhirawa menunjukkan pola adaptasi digital yang bersifat minimal dan administratif. Antara Jatim, sebagai media negara, menggunakan situs web dan media sosial secara formal—menyalurkan berita resmi dari pusat tanpa strategi digital yang partisipatif. Distribusi konten dilakukan secara satu arah, dengan keterlibatan audiens yang sangat rendah. Tidak ada upaya segmentasi audiens, pengoptimalan algoritma, atau penggunaan data analitik secara aktif.

Sebaliknya, Harian Bhirawa mencoba strategi digital yang lebih terbuka, meski terbatas oleh keterbatasan SDM dan infrastruktur. Mereka aktif mengunggah berita harian dan membagikannya di media sosial, namun belum memanfaatkan alat bantu seperti SEO, analitik audiens, atau sistem manajemen konten. Tidak ada tim khusus digital, dan proses distribusi dilakukan secara manual, bergantung pada kapasitas individu redaktur.

Adaptasi terhadap logika algoritmik terlihat pada praktik penyesuaian judul berita agar lebih clickable. Judul sensasional atau memanfaatkan isu viral digunakan untuk meningkatkan potensi keterbacaan, meskipun isi tetap normatif. Ini mencerminkan upaya parsial untuk mengikuti logika distribusi platform, tetapi belum didukung oleh strategi ekosistem digital yang menyeluruh.

Dalam perspektif Winseck (2016) dan Fuchs (2021), kondisi ini menunjukkan posisi subordinat media lokal dalam arsitektur kapitalisme digital global. Mereka menjadi content providers tanpa kuasa atas distribusi, visibilitas, dan monetisasi konten. Platform global memegang kendali atas algoritma yang menentukan siapa yang melihat konten, kapan, dan dalam konteks apa—sementara media lokal tidak memiliki akses terhadap sistem itu, apalagi daya tawar.

Dari sisi pendapatan, kedua media juga belum memanfaatkan potensi monetisasi digital. Harian Bhirawa pernah mencoba iklan daring, namun dianggap tidak signifikan dibanding advertorial APBD. Antara Jatim, secara struktural, bahkan tidak memiliki otoritas untuk menjual iklan melalui situsnya. Dengan demikian, digitalisasi belum menjadi solusi ekonomi, melainkan hanya perluasan kanal distribusi dari sistem lama.

Interaksi dengan audiens juga masih pasif. Kolom komentar tidak dimoderasi secara aktif, dan tidak ada forum publik digital yang dibangun untuk dialog. Akibatnya, relasi antara media dan publik tetap top-down, tidak berkembang menjadi relasi partisipatif sebagaimana karakter utama ekosistem digital.

Temuan ini memperlihatkan bahwa media lokal berada dalam fase adaptasi permukaan terhadap platformisasi—digitalisasi terjadi secara teknis, tetapi belum menyentuh transformasi struktural dalam produksi, distribusi, dan ekonomi media. Dalam sistem ini, kekuasaan tidak lagi hanya di tangan negara atau pemilik modal lokal, tetapi berpindah ke tangan platform digital global yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak bisa dinegosiasikan oleh media kecil.

Dengan demikian, logika algoritma memperkuat marginalisasi media lokal. Bukan hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari sisi visibilitas, jangkauan, dan kapasitas untuk memengaruhi ruang publik digital. Dalam kerangka ekonomi politik media, ini menandakan bahwa platformisasi tidak secara otomatis mendemokratisasi informasi, melainkan menciptakan bentuk baru dari struktur dominasi global atas wacana lokal.

## 4.2. Refleksi Tematik dan Sintesis Temuan

### 4.2.1 Pola Relasi Media dan Pemerintah Daerah

Relasi antara media dan pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam membentuk lanskap komunikasi publik di tingkat lokal. Dalam konteks ekonomi politik media, hubungan ini tidak hanya bersifat teknis (misalnya kerja sama peliputan), tetapi juga mencerminkan konfigurasi kekuasaan yang dapat memengaruhi independensi media, kualitas informasi publik, serta keberlangsungan institusi media itu sendiri. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa baik Kantor Berita Antara Jatim maupun Harian Bhirawa memiliki relasi yang intens, tetapi berbeda secara struktural dan praktik, dengan pemerintah daerah di Jawa Timur.

Pada Antara Jatim, pola hubungan dengan pemerintah daerah bersifat formal dan institusional. Sebagai bagian dari BUMN, Antara memiliki legitimasi untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendiseminasi informasi pembangunan, kebijakan publik, dan pencapaian kinerja. Banyak pemerintah daerah menjalin kerja sama resmi dengan Antara dalam bentuk layanan distribusi berita, siaran pers, dan dokumentasi kegiatan pemerintahan. Model kerja sama ini biasanya dituangkan dalam nota kesepahaman (*MoU*) atau kontrak kerja tahunan yang melibatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama dari bagian kehumasan atau dinas komunikasi dan informatika.

Karena statusnya sebagai media resmi negara, Antara Jatim relatif aman dari tekanan politis langsung. Namun, relasi yang terlalu formal dan birokratis ini membuat ruang untuk praktik jurnalisme kritis menjadi sangat terbatas. Dalam wawancara, beberapa jurnalis Antara mengakui bahwa berita-berita yang dianggap

“tidak kondusif” atau berpotensi mengganggu hubungan kelembagaan dengan mitra daerah lebih baik dihindari atau disunting secara hati-hati. Dengan kata lain, hubungan harmonis dengan pemerintah daerah menjadi prioritas, bahkan jika harus mengorbankan keberimbangan isi berita. Ini mencerminkan bentuk kontrol simbolik dari kekuasaan negara terhadap institusi media negara.

Sementara itu, Harian Bhirawa menunjukkan pola relasi yang lebih informal, namun justru lebih kompleks. Sebagai media lokal swasta yang mengandalkan iklan dan advertorial dari pemerintah daerah, Bhirawa menjalin hubungan yang cenderung bersifat patronase. Pemerintah daerah berperan sebagai klien utama yang membiayai sebagian besar ruang pemberitaan, terutama dalam bentuk advertorial dan liputan kegiatan pejabat publik. Dalam praktiknya, kerja sama ini tidak selalu berbasis kontrak tertulis jangka panjang, melainkan bersifat transaksional, fleksibel, dan kadang melalui komunikasi personal antara wartawan dan pejabat humas.

Model relasi semacam ini menciptakan medan tarik-menarik antara kebutuhan ekonomi media dan harapan politis dari pemerintah daerah. Di satu sisi, Harian Bhirawa membutuhkan pemasukan tetap untuk menutupi biaya operasional, terutama karena sirkulasi cetak terus menurun dan iklan komersial dari swasta terbatas. Di sisi lain, pemerintah daerah melihat media sebagai alat strategis untuk membentuk opini publik dan menjaga citra pejabat. Akibatnya, ruang redaksional menjadi “diperdagangkan” dalam arti tertentu, di mana akses pemberitaan ditukar dengan loyalitas editorial atau penyuntingan isi yang sesuai dengan kepentingan pihak pemesan.

Hubungan patronase ini memiliki implikasi serius terhadap independensi media dan kualitas demokrasi lokal. Dalam banyak kasus, berita kritis terhadap pemerintah daerah sangat jarang ditemukan di Harian Bhirawa, kecuali terhadap lawan politik dari pihak yang sedang berkuasa. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa media berfungsi bukan sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*), melainkan sebagai alat legitimasi kekuasaan (*lapdog*). Hal ini diperkuat oleh testimoni jurnalis yang menyebutkan bahwa mereka mendapat imbauan dari atasannya untuk “menghindari konflik dengan mitra strategis” atau “tidak memberitakan secara berlebihan” isu-isu sensitif seperti kebocoran anggaran atau korupsi.

Dalam kerangka teori Propaganda Model dari Herman dan Chomsky (1988), praktik seperti ini dapat dibaca sebagai bentuk dominasi kekuasaan ekonomi dan politik atas isi media. Pemerintah daerah bertindak sebagai sponsor utama yang memiliki daya tawar terhadap media, sehingga mampu menentukan prioritas pemberitaan. Sementara dalam pandangan Mosco (2009), relasi ini menunjukkan bagaimana proses komodifikasi media berlangsung bukan hanya melalui mekanisme pasar terbuka, tetapi juga melalui struktur kekuasaan lokal yang membatasi pluralitas informasi.

Menariknya, di tengah hubungan yang sangat simbiotik ini, terdapat pula praktik negosiasi yang bersifat oportunistik dan situasional. Misalnya, pada masa kampanye kepala daerah atau saat muncul krisis politik lokal, pemerintah daerah cenderung meningkatkan anggaran komunikasi untuk menjaga citra publik. Pada saat inilah media seperti Bhirawa mendapatkan kontrak advertorial dalam jumlah besar. Namun, setelah momentum tersebut berlalu, kerja sama cenderung menurun dan media kembali menghadapi kesulitan finansial. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara media dan pemda bersifat tidak stabil dan sangat tergantung pada konteks politik sesaat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam relasi media–pemerintah daerah di tingkat lokal, tidak ada batas yang jelas antara kerja jurnalistik profesional dan relasi ekonomi-politis pragmatis. Media lokal sering kali terjebak dalam dilema antara menjaga idealisme profesi dan menjaga keberlangsungan usaha. Ini adalah tantangan nyata dalam membangun ekosistem media lokal yang sehat, profesional, dan berdaya saing di era digital.

#### 4.2.2 Konteks Lokal dan Resistensi Jurnalis

Di tengah struktur kekuasaan ekonomi-politik yang membatasi ruang gerak media lokal, masih terdapat ruang-ruang kecil di mana para jurnalis berupaya mempertahankan idealisme mereka. Resistensi ini tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan frontal, tetapi lebih sering bersifat simbolik, subtil, dan berbasis inisiatif individu. Dalam konteks lokal seperti di Jawa Timur, di mana hubungan antara media dan kekuasaan daerah bersifat sangat cair dan personal, bentuk-bentuk perlawanan jurnalis menunjukkan kompleksitas yang layak dicermati.

Penelitian ini menemukan bahwa baik di Antara Jatim maupun Harian Bhirawa, terdapat sejumlah jurnalis yang menyadari adanya kompromi nilai-nilai jurnalistik dalam praktik keseharian mereka. Meskipun berada dalam sistem yang mengutamakan stabilitas relasi kelembagaan dan pemasukan ekonomi, beberapa jurnalis tetap berusaha menjaga integritas dengan memilih topik-topik yang tidak bersinggungan langsung dengan

kepentingan pemilik atau mitra pemerintah. Misalnya, mereka menulis isu-isu kemasyarakatan seperti lingkungan, UMKM, atau pendidikan alternatif dengan topik-topik yang dianggap netral secara politik namun tetap bermuatan sosial.

Salah satu bentuk resistensi yang muncul adalah melalui platform pribadi, seperti blog, media sosial, atau kanal YouTube independen. Beberapa jurnalis dari kedua media diketahui memiliki kanal pribadi tempat mereka menuliskan opini atau ulasan isu yang tidak bisa mereka sampaikan secara terbuka di media tempat mereka bekerja. Meskipun jangkauan pembacanya terbatas, ruang ini menjadi semacam “katup pengaman” untuk melampiaskan gagasan yang tidak tertampung di ruang redaksi. Dalam wawancara, seorang jurnalis Antara menyatakan bahwa ia merasa lebih bebas menulis di akun Medium-nya dibanding di kanal resmi kantor berita.

Bentuk resistensi lain adalah melalui praktik selektif dalam peliputan. Sejumlah wartawan Bhirawa, misalnya, secara sengaja menghindari menulis berita advertorial yang bertentangan dengan nurani mereka. Mereka lebih memilih tugas peliputan umum atau menulis berita rutin yang tidak terlalu bersinggungan dengan kepentingan sponsor. Di sisi lain, beberapa jurnalis Antara secara diam-diam mengarsipkan data atau melakukan riset isu yang belum dapat mereka publikasikan, dengan harapan suatu saat dapat digunakan untuk proyek jurnalistik yang lebih independen.

Namun, resistensi ini sering kali berlangsung dalam ruang yang sempit dan tanpa dukungan struktural. Baik Antara Jatim maupun Harian Bhirawa tidak memiliki mekanisme kelembagaan untuk melindungi atau mendukung jurnalis yang ingin bersikap lebih independen. Tidak ada unit redaksi khusus untuk liputan mendalam atau investigatif. Tidak ada pelatihan rutin tentang etika jurnalistik atau perlindungan hukum untuk jurnalis yang menghadapi tekanan. Akibatnya, resistensi jurnalis bersifat individual, sporadis, dan rentan terhadap tekanan internal maupun eksternal.

Dalam kerangka teori hegemoni Gramsci (yang diadopsi dalam pendekatan ekonomi politik komunikasi oleh Mosco, 2009), apa yang dilakukan oleh para jurnalis ini dapat disebut sebagai bentuk “perlawanan dalam sistem hegemoni”. Mereka tidak melawan secara langsung, tetapi menciptakan ruang-ruang alternatif dalam sistem yang hegemonik. Ini memperlihatkan bahwa meskipun struktur ekonomi-politik media bersifat dominan, tidak semua aktor di dalamnya sepenuhnya tunduk. Ada proses negosiasi, penyesuaian, bahkan penolakan halus yang dilakukan oleh para pelaku media.

Konteks lokal juga sangat memengaruhi bentuk dan ruang resistensi tersebut. Di daerah-daerah yang struktur politiknya cenderung oligarkis atau patronistik, seperti sebagian wilayah di Jawa Timur, tekanan terhadap media tidak selalu bersifat koersif. Sebaliknya, tekanan itu hadir dalam bentuk relasi sosial yang akrab melalui jamuan, diskusi informal, atau pemberian “amplop” setelah peliputan. Dalam situasi ini, menolak kepentingan penguasa berarti menolak hubungan sosial yang telah terbangun. Oleh karena itu, resistensi bukan hanya soal keberanian profesional, tetapi juga tentang kapasitas untuk menegosiasikan posisi dalam jaringan sosial-politik lokal.

Beberapa jurnalis menyatakan bahwa mereka masih berharap pada perubahan dari dalam institusi. Mereka menginginkan adanya revitalisasi redaksi yang lebih terbuka terhadap keberagaman ide, serta keberanian pimpinan media untuk mendukung liputan yang benar-benar berpihak pada publik. Harapan ini menunjukkan bahwa resistensi tidak hanya berarti oposisi, tetapi juga bentuk keterlibatan aktif untuk memperbaiki sistem dari dalam.

Secara keseluruhan, sub-bagian ini menegaskan bahwa dalam realitas media lokal, ruang perlawanan terhadap dominasi ekonomi-politik memang sempit, namun tetap ada. Ia hadir dalam bentuk mikro melalui pilihan kata, penundaan penerbitan berita, atau penciptaan ruang narasi alternatif. Meskipun belum mampu mengubah struktur secara signifikan, praktik-praktik ini penting untuk dicatat sebagai embrio dari jurnalisme independen yang mungkin tumbuh ketika ruang struktural dan dukungan kelembagaan memungkinkan.

#### 4.3 Pembahasan

Studi ini menggambarkan bagaimana struktur ekonomi politik media lokal di Indonesia, khususnya pada dua entitas media yakni Kantor Berita Antara Biro Jawa Timur dan Harian Bhirawa, tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan, kepemilikan, dan logika produksi konten yang saling terkait dalam konteks digitalisasi. Pola kepemilikan, struktur pendanaan, interaksi dengan kekuasaan lokal, hingga kemampuan adaptasi terhadap platform digital membentuk kondisi kerja jurnalistik dan arah isi pemberitaan secara signifikan. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik komunikasi, dapat disimpulkan bahwa kondisi media lokal bukan sekadar hasil dari dinamika teknologi, tetapi lebih dalam lagi mencerminkan reproduksi struktur dominasi politik dan ekonomi dalam sistem informasi publik.

Dari sisi pola kepemilikan, dua media yang dikaji merepresentasikan dua kutub yang berbeda: Antara Jatim sebagai media milik negara (BUMN) dan Harian Bhirawa sebagai media swasta lokal dengan afiliasi politik. Model kepemilikan ini secara langsung memengaruhi struktur ekonomi dan relasi kekuasaan yang menyertainya. Antara Jatim memiliki kekuatan infrastruktur yang terpusat dan legitimasi institusional sebagai corong resmi pemerintah, tetapi hal tersebut justru menjadikannya terikat secara struktural dalam menyuarakan narasi-narasi institusional negara. Di sisi lain, Bhirawa memiliki keleluasaan untuk menentukan arah redaksi, namun sangat bergantung pada pendanaan advertorial dari pemerintah daerah yang membuatnya rentan terhadap kooptasi oleh elite lokal. Dengan demikian, baik dalam bentuk negara maupun swasta, kedua media menghadapi tekanan yang menjadikan independensi redaksional sebagai komoditas yang dapat dinegosiasikan, bukan nilai absolut.

Praktik produksi berita pada kedua media menunjukkan pola yang selaras dengan kepentingan pemilik dan sponsor. Di Antara Jatim, produksi berita berorientasi pada peliputan institusional, mengikuti agenda resmi pemerintah dan lembaga negara. Ketiadaan peliputan kritis bukan karena ketidakmampuan jurnalis, melainkan karena struktur birokratis dan tekanan institusional yang tidak membuka ruang bagi jurnalisisme investigatif. Di Bhirawa, redaksi justru menghadapi tekanan dari sisi pasar: kebutuhan akan iklan dan advertorial membuat ruang berita dikompromikan demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah. Dalam situasi ini, berita kritis sering kali disisihkan, atau bahkan “disunting” agar sesuai dengan kepentingan klien. Kedua kondisi ini memperlihatkan bagaimana ruang redaksional dibentuk bukan oleh nilai-nilai jurnalistik universal, melainkan oleh struktur kekuasaan yang ada di belakang media.

Kondisi ini semakin kompleks ketika memasuki ranah distribusi digital. Kedua media telah memiliki kanal daring, namun belum menjalani transformasi digital secara substantif. Adaptasi terhadap platform seperti Google dan media sosial dilakukan secara pasif dan administratif. Tidak ada unit digital khusus, tidak ada strategi konten berbasis data, dan tidak ada mekanisme monetisasi yang aktif. Bahkan pemanfaatan SEO dan judul yang disesuaikan dengan tren hanya menjadi alat untuk meningkatkan keterbacaan, bukan bagian dari strategi digital yang terintegrasi. Ini menunjukkan bahwa platformisasi, yang secara teoretis dipandang sebagai peluang untuk demokratisasi distribusi informasi, justru menciptakan ketimpangan baru. Media lokal berada di posisi subordinat, tanpa kemampuan dan sumber daya untuk menavigasi logika algoritmik yang menguasai lanskap informasi digital.

Relasi antara media dan pemerintah daerah menjadi salah satu aspek paling menentukan dalam praktik kerja jurnalistik lokal. Dalam banyak kasus, hubungan ini bersifat simbiotik-pragmatis. Antara Jatim menjalin kerja sama formal dengan pemda sebagai bagian dari pelayanan informasi publik, sedangkan Bhirawa membangun hubungan patronase berbasis ekonomi melalui kontrak advertorial dan peliputan berbayar. Hubungan ini membuat media tidak lagi berfungsi sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*), tetapi sebagai penyampai pesan institusi (*lapdog*). Ketiadaan regulasi yang transparan mengenai kerja sama pemda–media, serta lemahnya etika distribusi iklan pemerintah, memperkuat praktik ini sebagai hal yang lumrah. Hal ini mendukung temuan dari teori propaganda model bahwa sumber dana dan kepemilikan adalah dua filter utama yang menentukan isi pemberitaan dan arah redaksional media.

Studi ini juga menemukan bahwa struktur dominasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil mematikan inisiatif jurnalis. Dalam ruang-ruang mikro redaksi, terdapat bentuk-bentuk resistensi simbolik yang dilakukan secara individual. Beberapa jurnalis membangun kanal opini pribadi, blog independen, atau menulis topik-topik netral yang tetap relevan secara sosial. Meski ruang resistensi ini terbatas dan tidak mendapatkan dukungan struktural, kehadirannya mencerminkan adanya kesadaran profesional yang bertahan dalam sistem yang represif. Dalam pandangan teori hegemoni, resistensi semacam ini menjadi penting sebagai benih perubahan jika suatu saat terdapat ruang politik atau kebijakan yang memungkinkan media untuk tumbuh secara lebih independen.

Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi politik media lokal Indonesia masih didominasi oleh relasi kuasa yang asimetris antara pemilik, pemerintah, dan jurnalis. Digitalisasi belum memberikan solusi terhadap persoalan lama tentang ketergantungan dan intervensi, justru menciptakan bentuk subordinasi baru terhadap kekuatan algoritmik global. Independensi media tidak hanya menghadapi tantangan dari kekuasaan lokal, tetapi juga dari ketimpangan teknologi dan struktur kapitalisme digital. Oleh karena itu, transformasi media lokal membutuhkan pendekatan yang lebih sistemik, tidak hanya melalui pelatihan digital dan reformasi bisnis media, tetapi juga melalui rekonstruksi ulang hubungan antara negara, pasar, dan kebebasan pers dalam kerangka demokrasi yang substansial.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi politik media di tingkat lokal Indonesia masih berada dalam cengkeraman dua kekuatan dominan: negara dan pasar. Studi terhadap Kantor Berita Antara Jatim dan

Harian Bhirawa mengungkap bahwa meskipun berbeda dalam status kepemilikan, keduanya menghadapi tantangan serupa dalam mempertahankan independensi redaksional dan merespons dinamika digital.

Pertama, ketergantungan pada pendanaan institusional, baik dari APBN maupun APBD, menciptakan struktur ekonomi yang tidak kondusif bagi praktik jurnalisme kritis. Hal ini melahirkan pola produksi konten yang bersifat repetitif, ritualistik, dan menghindari konflik kepentingan. Kedua, minimnya strategi digital yang substansial menunjukkan bahwa media lokal masih berada dalam tahap adaptasi teknis terhadap platformisasi, tanpa disertai transformasi model bisnis atau distribusi konten yang mandiri. Ketiga, mekanisme gatekeeping dalam ruang redaksi dibentuk oleh tekanan birokratis dan relasi patronase, menghasilkan praktik soft censorship yang mengaburkan batas antara berita dan propaganda.

Temuan ini mengkonfirmasi teori ekonomi politik media sebagaimana dikemukakan oleh Herman & Chomsky (1988), Mosco (1996), dan Fuchs (2021), bahwa relasi antara kepemilikan, pendanaan, dan kekuasaan secara determinan membentuk isi media, bahkan dalam konteks lokal yang tampaknya marjinal.

Secara teoretis, riset ini memperluas penerapan pendekatan ekonomi politik media ke dalam konteks media lokal digital di Global South, khususnya Indonesia. Integrasi antara teori klasik dan kontemporer memperlihatkan bagaimana media di daerah tidak hanya menghadapi represi dari negara, tetapi juga tekanan algoritmik dari platform global. Hal ini menunjukkan pentingnya merumuskan ulang kerangka ekonomi politik media yang mempertimbangkan agensi lokal dalam lanskap digital global.

Secara praktis, studi ini memberikan beberapa implikasi yaitu (1) Bagi media lokal: dibutuhkan restrukturisasi model bisnis dan kebijakan editorial yang memungkinkan pengembangan jurnalisme berbasis data, bukan sekadar corong kekuasaan. (2) Untuk pemerintah daerah dan pusat: perlu dirumuskan kebijakan afirmatif yang mendorong kemandirian media melalui insentif inovasi digital, bukan melalui ketergantungan terhadap dana advertorial yang berisiko menggerus fungsi pengawasan media. Dan terakhir (3) bagi akademisi dan peneliti: studi ini membuka ruang pengembangan lebih lanjut, seperti menjajaki hubungan antara struktur kepemilikan, logika algoritma platform, dan pembentukan opini publik di ruang digital lokal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Fokus pada dua media di satu wilayah provinsi membuat generalisasi temuan masih bersifat kontekstual. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses terhadap dokumen internal media serta algoritma distribusi platform membatasi kedalaman analisis di tingkat teknis. Untuk itu, studi lanjutan dapat memperluas skala wilayah, memperkaya pendekatan metodologis dengan analisis jejaring digital atau etnografi redaksi, serta mengeksplorasi bagaimana audiens lokal merespons dinamika distribusi informasi melalui media lokal digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagdikian, B. H. (2004). *The new media monopoly*. Boston: Beacon Press.
- Chomsky, N., & Herman, E. S. (1988). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media*. New York: Pantheon Books. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817299>
- Firmansyah, D. (2020). The Political Economy of the News Media in the Era of Digital Disruption: A Study on Online Journalism in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(1). <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3601-09>
- Fuchs, C. (2022). *Foundations of critical theory*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003031640>
- Fuchs, C. (2021). *Social media: A critical introduction (3rd ed.)*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781529715060>
- George, C. (2019). Digital Disruption and Journalism in Southeast Asia: The Challenge of New Media Power. *Media and Communication*, 7(1), 4–14. <https://doi.org/10.17645/mac.v7i1.1801>
- Hidayat, R., Rahmat Saleh, Herman Paninggiran, Yusraini, & Jamalullail. (2025). Political Communication Strategies in Conflict Resolution for the Relocation of the National Capital: a Constructive and Collaborative Approach. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.37826/spektrum.v13i1.867>
- Kristiyono, J. (2015). Budaya Internet: Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendukung Penggunaan Media di Masyarakat. *Scriptura*, 5(1), 23–30. <https://doi.org/10.9744/scriptura.5.1.23-30>
- Lim, M. (2011). Political Economy of the Indonesian Media after the Reformation. *Inter-Asia Cultural Studies*, 12(4), 558–575. <https://doi.org/10.1080/14649373.2011.616054>
- McChesney, R. W. (2008). *The political economy of media: Enduring issues, emerging dilemmas*. Monthly Review Press. <https://doi.org/10.4324/9781315633269>
- Mosco, V. (2009). *The political economy of communication (2nd ed.)*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446214246>
- Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). *Ownership and Control in Indonesian Media*. Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Report. <https://hdl-bnc-idrc.dspaceidrc.org/handle/10625/52500>
- Robet, R. (2016). The Rise of Soft Censorship in Indonesia. *International Journal of Communication*, 10. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5617>

- Siregar, E. (2018). *Politik Media Lokal: Otonomi Daerah dan Jurnalisme Kekuasaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tapsell, R. (2012). From Reporting to Public Relations: Ownership Influence on Television News in Indonesia. *South East Asia Research*, 20(3), 479–499. <https://doi.org/10.5367/sear.2012.0115>
- Tapsell, R. (2015). The Political Economy of Television in Post-New Order Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 45(1), 36–55. <https://doi.org/10.1080/00472336.2014.931084>
- Waisbord, S. (2013). *Reinventing professionalism: Journalism and news in global perspective*. Polity Press.
- Winseck, D. (2016). Reconstructing the political economy of communication for the digital media age. *The Political Economy of Communication*, 4(2).
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and Media in Indonesia. *Indonesia Journal*, 96, 11–33. <https://doi.org/10.1353/ind.2013.0020>
- Zhao, Y. (2008). *Communication in China: Political economy, power, and conflict*. Rowman & Littlefield. <https://doi.org/10.4324/9781315630589>